



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 1-2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3847068, 3449230 Psw. 5500;
Faksimile (021) 3864776; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-109/PB.6/2024

17 Oktober 2024

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 24 tentang Akuntansi Foreign Military Sales (FMS) dan Foreign Military Finance (FMF) Dilingkungan Kemhan dan TNI

Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor B/1265/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 hal Permohonan Kebijakan Akuntansi FMS dan FMF dilingkungan Kemhan dan TNI, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah menerbitkan beberapa kebijakan pencatatan dan pelaporan keuangan atas transaksi FMS dan FMF dilingkungan Kemhan dan TNI, diantaranya;
 - a. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-744/PB/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Foreign Military Sales (FMS) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI atas Beban APBN;
 - b. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-33/PB/2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan *Foreign Military Sales* (FMS) serta Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa Program Foreign Military Finance (FMF) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI atas Beban APBN; dan
 - c. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-123/PB.6/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Program *Foreign Military Finance* (FMF) dan Rilis Update Referensi Aplikasi SAIBA 20.0.1.
2. Berdasarkan PMK-171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, bahwa sejak Tahun Anggaran 2022 seluruh satuan kerja mulai menggunakan Aplikasi SAKTI dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN.
3. Dengan demikian, untuk dapat menyelaraskan kebijakan-kebijakan terkait transaksi FMS dan FMF yang telah diterbitkan sebelumnya, diperlukan pembaruan dan penyesuaian kebijakan pencatatan dan pelaporan keuangan atas transaksi FMF dan FMS dengan menggunakan Aplikasi SAKTI.
4. Menindaklanjuti hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, kami telah menyusun Petunjuk Teknis Akuntansi 24: Transaksi Program Foreign Military Sales (FMS) dan Foreign Military Finance (FMF) Dilingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana terlampir.
5. Petunjuk Teknis 24: Transaksi Program Foreign Military Sales (FMS) dan Foreign Military Finance (FMF) Dilingkungan Kemhan dan TNI menjelaskan teknis akuntansi mengenai:
 - a. Transaksi UP/TUP;

- b. Transaksi Pembayaran Program FMS dan FMF; dan
 - c. Pencatatan dan Penyesuaian Nilai Aset atas program FMS dan FMF.
6. Dalam hal unit teknis Saudara membutuhkan konfirmasi dan/atau diskusi lanjutan terkait Petunjuk Teknis Akuntansi 24: Transaksi Program Foreign Military Sales (FMS) dan Foreign Military Finance (FMF) Dilingkungan Kemhan dan TNI, agar dapat menyampaikan melalui layanan pengguna hai.kemenkeu.go.id atau sarana komunikasi lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran
4. Direktur Sistem Perbendaharaan
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara





PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 24

TRANSAKSI PROGRAM FOREIGN MILITARY SALES (FMS) DAN FOREIGN MILITARY FINANCE (FMF) DILINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI



DAFTAR ISI

A.DASAR HUKUM	5
B.PENDAHULUAN.....	6
C.TRANSAKSI UP/TUP	7
1. Penyediaan UP/TUP Pertama Kali.....	7
2. Pencatatan SP2D UP/TUP.....	7
D.TRANSAKSI GUP	8
1. GUP tidak Menghasilkan BMN.....	8
2. GUP Menghasilkan BMN Intrakomptabel.....	9
3. GUP Menghasilkan BMN Ekstrakomptabel	10
E.TRANSAKSI GUP NIHIL/PTUP	11
F. TRANSAKSI PEMBAYARAN PROGRAM FMS	12
1. Transaksi Pengadaan Aset Tetap	12
2. Transaksi Pengadaan Persediaan.....	13
G.PENYESUAIAN NILAI ASET ATAS NILAI REALISASI PEMBAYARAN	15
1. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Modal	15
2. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Barang Menghasilkan Barang Persediaan.....	16
a. Persediaan Dalam Proses Selesai Seluruhnya.....	16
b. Pembayaran Lebih Besar daripada Progres Pekerjaan	16
c. Persediaan Dalam Proses Selesai Sebagian.....	17
H.PENGAKUAN PENERIMAAN BARANG YANG BELUM DIBAYARKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	18
1. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Modal	18
2. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Barang Menghasilkan Barang Persediaan.....	19
I. PENYELESAIAN KDP DAN PERSEDIAAN DALAM PROSES	20
1. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Modal	20
2. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Barang Menghasilkan Barang Persediaan.....	20
J. SISA DANA PEMBAYARAN FMS/FMF DI REKENING PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT.....	21
1. Aset yang Telah Dicatat sebagai KDP	21
2. Barang Telah Dicatat sebagai Persediaan Dalam Proses.....	21
3. Penyetoran Sisa Dana ke Kas Negara	22
a. Penyetoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berjalan (TAB)	22
b. Penyetoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya (atas belanja TAYL).....	24
4. Pengalihan Sisa Dana.....	25

K. ASET DISERAHKAN DALAM KONDISI BELUM SIAP DIGUNAKAN	25
L. PEROLEHAN LAINNYA	26
1. Perlakuan Akuntansi atas Perolehan Lainnya Bentuk Aset Barang Pertahanan dari Program FMF	26
2. Perlakuan Akuntansi atas Perolehan Lainnya Bentuk Jasa dari Program FMF ...	27
3. Perolehan Lainnya pada Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	28

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI
TRANSAKSI PROGRAM FOREIGN MILITARY SALES (FMS) DAN
FOREIGN MILITARY FINANCE (FMF) LINGKUP KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TNI

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator & Penyunting:

Ketua Tim : Putu Jaya Permana (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Instansi)

Anggota Tim :

1. Angga Praditya Siagian (Pelaksana Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
2. Prisma Wahyu Ardana (Pelaksana Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
3. Heldina Puspa Maharani (Pelaksana Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
4. Havez Annamir (Pelaksana Seksi Sistem Akuntansi Instansi)

Kontributor :

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, beserta jajarannya.
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB
3. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN
4. Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara Dit. APK DJPB

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 24

PROGRAM FOREIGN MILITARY SALES (FMS) DAN FOREIGN MILITARY FINANCE (FMF) LINGKUP KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB.2019 tentang Mekanisme Pembayaran Program *Foreign Military Sales* di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
8. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua
9. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-744/PB/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan *Foreign Military Sales* (FMS) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI atas Beban APBN
10. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-33/PB/2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan *Foreign Military Sales* (FMS) serta Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa Program Foreign Military Finance (FMF) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI atas Beban APBN
11. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-123/PB.6/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Program *Foreign Military Finance* (FMF) dan Rilis Update Referensi Aplikasi SAIBA 20.0.1

B. PENDAHULUAN

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki program pengadaan aset dan persediaan alutsista sebagai salah satu fungsi dan tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Dalam pengadaan barang/jasa tersebut terdapat Program *Foreign Military Sales* yang selanjutnya disingkat sebagai FMS, merupakan prosedur penjualan barang atau jasa pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat kepada negara lain atau badan Internasional dan barang tersebut berasal dari stok angkatan bersenjata Amerika Serikat maupun pengadaan baru dari kontraktor/vendor. Mekanisme pembayaran Program FMS telah diatur di dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2019 tentang Mekanisme Pembayaran Program *Foreign Military Sales* di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan terkait program FMS telah diatur dalam Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-744/PB/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan *Foreign Military Sales* (FMS) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI atas Beban APBN, di mana dalam surat tersebut diatur kebijakan akuntansi program FMS terkait transaksi UP/TUP, pembayaran pengadaan barang/jasa, penyesuaian progres pengadaan, pengakuan utang jangka pendek, dan pelunasan cicilan.

Selanjutnya dilakukan Pembaruan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan terkait program FMS melalui surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-33/PB.6/2020 tanggal 05 Maret 2020 hal Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Program *Foreign Military Sales* (FMS) serta Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa Program *Foreign Military Finance* (FMF) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI atas Beban APBN, yang di mana mengatur akuntansi atas sisa dana dari program pembayaran FMS, akuntansi atas pencatatan aset yang telah diserahkan namun belum kondisi siap pakai, dan akuntansi pengesahan hibah langsung bentuk barang/jasa atas program *Foreign Military Finance* yang selanjutnya disingkat dengan FMF.

Kemudian dilakukan Pembaruan kebijakan kembali atas kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan terkait program FMS dan FMF melalui surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-123/PB.6/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Program *Foreign Military Finance* (FMF) dan Rilis *Update Referensi Aplikasi SAIBA 20.0.1* terkait akun Pencatatan Program FMF di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang mengatur terkait pencatatan pendapatan dan beban akrual atas perolehan barang/jasa yang diterima satker Kemhan/TNI dari program FMF yang bersumber selain dari Hibah dan APBN.

Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan terkait program FMS dan FMF sebelumnya mengatur proses teknis pencatatan yang masih menggunakan Aplikasi SAIBA, Persediaan, dan SIMAK BMN. Akan tetapi, sejak tahun 2020, seluruh satuan kerja di Indonesia mulai menggunakan Aplikasi SAKTI dalam proses pencatatan transaksi keuangan negara. Pelaksanaan teknis pencatatan akuntansi terkait program FMS dan FMF sebagaimana diatur sebelumnya, sedikit banyak menjadi kurang relevan setelah satuan kerja menggunakan Aplikasi SAKTI. Dengan demikian, untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap proses teknis pencatatan pada Aplikasi SAKTI, diperlukan pembaruan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Akuntansi terkait Program FMS dan FMF ini untuk dipedomani.

C. TRANSAKSI UP/TUP

1. Penyediaan UP/TUP Pertama Kali

Pencatatan UP/TUP dimulai pada saat penerbitan resume tagihan melalui Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	825xxx	Pengeluaran UP/TUP	-
Cr	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Neraca
Db	11561x	Piutang dari UP/TUP yang Akan Diterima	Neraca
Cr	825xxx	Pengeluaran UP/TUP	-

2. Pencatatan SP2D UP/TUP

Setelah terbit SP2D UP/TUP dan dilakukan pencatatan SP2D UP/TUP pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Neraca
Cr	219511	Uang Muka dari KPPN	Neraca
Db	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran UP/TUP	Neraca
Cr	11561x	Piutang dari UP/TUP yang Akan Diterima	Neraca

Pencatatan SP2D UP/TUP juga membentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Buku Besar Kas			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	825xxx	Pengeluaran UP/TUP	-
Cr	219511	Uang Muka dari KPPN	Neraca

D. TRANSAKSI GUP

Transaksi GUP atas transaksi pembayaran program FMS/FMF dilakukan melalui penerbitan SPM GUP yang diajukan oleh KPA Satker Kemhan/TNI dan Penerbitan SP2D GUP oleh KPPN Mitra.

Pada saat diterbitkan dan dilakukan perekaman dokumen SP2D GUP, Satker Kemhan/TNI akan mencatat adanya realisasi belanja barang/jasa dan/atau belanja modal di LRA, beban barang/jasa di LO, dan/atau aset barang pertahanan di Neraca sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SP2D GUP.

1. GUP tidak Menghasilkan BMN

Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang telah dilakukan verifikasi, Satker menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) melalui Modul Pembayaran sehingga terbentuk jurnal buku besar sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	5xxxxx	Beban xxx	LO
Cr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca

Selanjutnya, penerbitan resume tagihan (SPP GUP) melalui Modul Pembayaran menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca
Cr	21211x	Belanja xxx yang Masih Harus Dibayar	Neraca

Setelah SP2D GUP terbit dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, akan terbentuk jurnal pada buku besar akrual dan kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	21211x	Belanja xxx yang Masih Harus Dibayar	Neraca
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE
Buku Besar Kas			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	5xxxxx	Belanja xxx	LRA
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

2. GUP Menghasilkan BMN Intrakomptabel

Pencatatan dimulai dari terjadi penerimaan barang disertai dengan BAST yang dicatat pada Modul Komitmen sehingga membentuk Jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117911/139xxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Neraca
Cr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca

Pencatatan BAST pada Modul Komitmen tersebut dilanjutkan dengan Pendetailan barang pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117xxx/13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	Neraca
Cr	117911/139xxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	Neraca

Pada saat penerbitan SPP GUP melalui Modul Pembayaran, akan terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca
Cr	21211x	Belanja xxx yang Masih Harus Dibayar	Neraca

Setelah SP2D GUP terbit dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, akan terbentuk jurnal pada buku besar akrual dan kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	21211x	Belanja xxx yang Masih Harus Dibayar	Neraca
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE
Buku Besar Kas			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	5xxxxx	Belanja xxx	LRA
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

3. GUP Menghasilkan BMN Ekstrakomptabel

Dalam hal Satker Kemhan/TNI dalam pelaksanaan program FMS/FMF terdapat pembelian barang yang nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, seperti aset yang nilainya;

- a. di bawah Rp25.000.000 untuk Gedung dan Bangunan; dan
- b. di bawah Rp1.000.000 untuk Peralatan dan mesin,

Satker melakukan pencatatan penerimaan barang disertai BAST yang dicatat pada Modul Komitmen, sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	52125x	Beban xxx Ekstrakomptabel	LO
Cr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca

Pencatatan BAST pada Modul Komitmen tersebut dilanjutkan dengan pendetailan barang pada Modul Aset Tetap. Akan tetapi, pendetailan Aset Ekstrakomptabel **tidak membentuk jurnal apa pun**, aplikasi SAKTI hanya mencatat Aset Ekstrakomptabel tersebut ke dalam Daftar BMN.

Selanjutnya, pada saat penerbitan SPP GUP melalui Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca
Cr	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Neraca

Setelah SP2D GUP terbit dan dilakukan pencatatan SP2D GUP pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual dan kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Neraca
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE
Buku Besar Kas			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	52125x	Belanja xxx Ekstrakomptabel	LRA
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

E. TRANSAKSI GUP NIHIL/PTUP

Transaksi pertanggungjawaban UP/TUP dan pengembalian UP/TUP atas transaksi pembayaran program FMS/FMF terjadi apabila KPA Satker Kemhan/TNI mengajukan SPM GUP Nihil dan/atau SPM Pertanggungjawaban TUP (PTUP) atau menyetorkan kembali sisa UP/TUP ke rekening kas umum negara.

Jurnal yang terbentuk ketika perekaman SPP GUP NIHIL/PTUP melalui Modul Pembayaran adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	212xxx	Utang Kepada Pihak Ketiga	Neraca
Cr	815xxx	Penerimaan Pengembalian UP/TUP	-
Db	815xxx	Penerimaan Pengembalian UP/TUP	-
Cr	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Neraca

Pada saat diterbitkan dan dilakukan dokumen SP2D GUP Nihil/PTUP melalui Modul Pembayaran dan/atau saat perekaman bukti setor sisa UP/TUP ke rekening kas umum negara, pencatatan SP2D tersebut pada Modul Pembayaran akan membentuk jurnal pada buku besar akrua dan kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	815xxx	Penerimaan Pengembalian UP/TUP	-
Cr	212xxx	Utang Kepada Pihak Ketiga	Neraca
Db	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Neraca
Cr	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran UP/TUP	Neraca
Db	219511	Uang Muka dari KPPN	Neraca
Cr	815xxx	Penerimaan Pengembalian UP/TUP	-
Buku Besar Kas			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	219511	Uang Muka dari KPPN	Neraca
Cr	815xxx	Penerimaan Pengembalian UP/TUP	-

Pencatatan penyetoran sisa UP/TUP dilakukan berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrua dan kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	815xxx	Penerimaan Pengembalian UP/TUP	-
Cr	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran UP/TUP	Neraca
Db	219511	Uang Muka dari KPPN	Neraca
Cr	815xxx	Penerimaan Pengembalian UP/TUP	-

Buku Besar Kas			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	219511	Uang Muka dari KPPN	Neraca
Cr	815xxx	Penerimaan Pengembalian UP/TUP	-

F. TRANSAKSI PEMBAYARAN PROGRAM FMS

Uang muka belanja program FMS adalah pembayaran di muka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu oleh Satker Kemhan/TNI sebelum pemerintah Amerika Serikat menyerahkan hasil pekerjaan/jasa berupa barang/jasa pertahanan. Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk transaksi pembayaran program FMS/FMF diatur sebagai berikut.

1. Transaksi Pengadaan Aset Tetap

Uang muka belanja melalui mekanisme UP/TUP yang pembayarannya dilakukan saat komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dengan pemerintah Amerika Serikat telah ditandatangani (belum ada prestasi penyelesaian pekerjaan dan belum dilakukan pertanggungjawaban TUP), maka terhadap pengeluaran uang belanja tersebut perlakuan akuntansinya sebagai berikut.

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap terdiri dari harga beli atau pembayaran termin, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Dalam hal pembayaran menggunakan akun belanja modal Peralatan dan Mesin (532xxx) dengan kondisi aset tersebut masih dalam proses produksi dan belum diterima oleh satker Kemhan/TNI, maka satker merekam adanya aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan rincian barang Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan (7xxxxxxxxx) pada Rincian Barang pada saat perekaman BAST.

Jurnal otomatis yang akan terbentuk oleh Aplikasi atas Perekaman BAST tersebut adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	Neraca
Cr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca

Selanjutnya, satker melakukan pendetilan aset KDP tersebut melalui Menu Perolehan KDP pada Modul Aset Tetap. Atas transaksi pendetilan tersebut, Jurnal otomatis akan terbentuk sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Neraca
Cr	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	Neraca

Akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya (218111) yang terbentuk pada saat perekaman BAST di Modul Komitmen akan tereliminasi pada saat proses penerbitan resume tagihan (SPP) pada Modul Pembayaran, dengan jurnal otomatis pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca
Cr	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Neraca

Selanjutnya, akun Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar (212113) akan tereliminasi pada saat SP2D telah terbit dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, dengan jurnal otomatis pada Buku Besar Akrual dan Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Neraca
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE
Buku Besar Kas			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	53xxxx	Belanja Modal xxx	LRA
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

2. Transaksi Pengadaan Persediaan

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian atas pembayaran termin, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Dalam hal pembayaran menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (52xxxx) kondisi aset tersebut masih dalam proses produksi dan belum diterima oleh satker Kemhan/TNI, maka satker merekam adanya Persediaan Dalam Proses dengan menggunakan kode barang Persediaan Dalam Proses (10109xxxxx) pada Rincian Barang pada saat perekaman BAST dengan kuantitas bernilai 1 (satu) dan nilai satuan senilai pembayaran.

Jurnal otomatis yang akan terbentuk pada Modul Komitmen atas Perekaman BAST tersebut adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca
Cr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca

Akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya (218111) yang terbentuk pada saat perekaman BAST di Modul Komitmen akan tereliminasi pada saat proses penerbitan resume tagihan (SPP) pada Modul Pembayaran, dengan jurnal otomatis pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca
Cr	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Neraca

Selanjutnya, satker melakukan pendetilan persediaan tersebut melalui Menu Pembelian pada Modul Persediaan. Atas transaksi pendetilan tersebut, Jurnal otomatis akan terbentuk sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca
Cr	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca

Selanjutnya, akun Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) akan tereliminasi pada saat SP2D telah terbit dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, dengan jurnal otomatis pada Buku Besar Akrual dan Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Neraca
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE
Buku Besar Kas			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	52xxxx	Belanja Barang xxx	LRA
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

Pembayaran termin selanjutnya yang menggunakan kode akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (52xxxx) dan kondisi persediaan tersebut masih dalam proses produksi dan belum diterima oleh satker Kemhan/TNI, maka satker merekam kembali adanya Persediaan Dalam Proses menggunakan layer persediaan baru menggunakan kode barang Persediaan Dalam Proses (10109xxxxx) pada Rincian Barang saat perekaman BAST dengan rincian kuantitas 1 (satu) dan nilai satuan senilai pembayaran termin. Hal ini tetap dilakukan sepanjang pembayaran termin pengadaan persediaan Program FMS masih berlanjut sampai dengan pembayaran termin terakhir.

Atas akan dilakukannya pembayaran termin selanjutnya, satker melakukan perekaman kembali pada Modul Komitmen yang menghasilkan jurnal otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca
Cr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca

Akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya (218111) yang terbentuk pada saat perekaman BAST di Modul Komitmen akan tereliminasi pada saat proses penerbitan resume tagihan (SPP) pada Modul Pembayaran.

Selanjutnya, satker melakukan pendetilan persediaan tersebut melalui Menu Pembelian pada Modul Persediaan. Atas transaksi pendetilan tersebut, Jurnal otomatis akan terbentuk sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca
Cr	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca

G. PENYESUAIAN NILAI ASET ATAS NILAI REALISASI PEMBAYARAN

Dalam hal pada tanggal pelaporan keuangan setelah pembayaran uang muka belanja program FMS/FMF dilakukan, namun belum dilakukan pertanggungjawaban TUP, Satker Kemhan/TNI perlu melakukan verifikasi nilai progres penyelesaian pekerjaan atas pembayaran program FMS. Hasil verifikasi nilai progres penyelesaian pekerjaan tersebut dibandingkan dengan nilai realisasi pembayaran uang muka atas program FMS/FMF tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Modal

Dalam hal pembayaran menggunakan akun belanja modal (532xxx) dan telah didetailkan sebagai KDP, apabila pada tanggal pelaporan nilai progres penyelesaian pekerjaan **lebih kecil** daripada nilai realisasi pembayaran uang muka belanja, maka dilakukan penyesuaian pencatatan atas nilai aset KDP menggunakan mekanisme Koreksi Nilai Berkurang KDP pada Modul Aset Tetap sebesar nilai selisih antara realisasi pembayaran dengan hasil verifikasi nilai progres penyelesaian aset. Atas transaksi ini, jurnal otomatis akan terbentuk pada Modul Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
Cr	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Neraca

Selanjutnya, untuk menyesuaikan nilai Uang muka belanja modal atas penyesuaian nilai berkurang tersebut, satker merekam jurnal manual pada Modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) senilai selisih nilai antara realisasi pembayaran dengan hasil verifikasi progres penyelesaian aset sebagai berikut:

Buku Besar Akual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	11421x	Uang Muka Belanja xxx (prepayment)	Neraca
Cr	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE

2. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Barang Menghasilkan Barang Persediaan

Dalam hal pembayaran program FMS/FMF menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (52xxxx), telah terdapat penyerahan **sebagian** atau **seluruh** barang persediaan dari pemerintah Amerika Serikat, satker Kemhan/TNI perlu melakukan koreksi nilai persediaan dalam proses yang kemudian merekam penyelesaian persediaan dalam proses. Atas koreksi nilai persediaan tersebut, dilakukan reklasifikasi kode akun melalui jurnal manual untuk mengakui adanya uang muka belanja.

Dalam hal terdapat penyerahan sebagian persediaan dalam proses, satker Kemhan/TNI agar menentukan nilai perolehan persediaan yang telah diterima dengan kondisi siap untuk digunakan. Nilai perolehan sebagian persediaan tersebut, dibandingkan dengan nilai pembayaran FMS yang telah dibayarkan sebelumnya. Satker Kemhan/TNI agar melakukan penyesuaian nilai Persediaan sesuai dengan kondisi sebagai berikut:

a. Persediaan Dalam Proses Selesai Seluruhnya

Jika pada tanggal pelaporan Persediaan Dalam Proses telah selesai dikembangkan dan sudah dapat diakui sebagai persediaan definitif dan siap untuk digunakan, satker dapat merekam Penyelesaian Persediaan Dalam Proses pada Modul Persediaan sehingga membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akual			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117xxx	Persediaan	Neraca
Cr	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca

b. Pembayaran Lebih Besar daripada Progres Pekerjaan

Jika pada tanggal pelaporan Persediaan Dalam Proses belum diselesaikan seluruhnya namun nilai pembayaran yang telah dilakukan lebih besar daripada progres pekerjaan, satker agar melakukan koreksi nilai berkurang pada Modul Persediaan atas persediaan dalam proses yang

pembayarannya lebih besar daripada progres sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	593311/ 391113	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Persediaan	LO/LPE
Cr	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca

Kemudian satker merekam jurnal manual pada Modul Aklap untuk mengakui adanya Uang Muka Belanja atas transaksi koreksi sebelumnya sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	11421x	Uang Muka Belanja xxx (prepayment)	Neraca
Cr	593311/ 391113	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Persediaan	LO/LPE

c. Persediaan Dalam Proses Selesai Sebagian

Jika pada tanggal pelaporan terdapat persediaan dalam proses yang telah selesai sebagian dan pembayaran yang telah dilakukan tetap lebih besar daripada progres pekerjaan, satker agar merekam koreksi nilai berkurang pada Modul Persediaan atas persediaan yang selesai sebagian sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	593311/ 391113	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Persediaan	LO/LPE
Cr	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca

Kemudian, dikarenakan satker telah menerima persediaan yang siap untuk digunakan atas pembayaran termin-termin sebelumnya, satker perlu merekam transaksi Penyelesaian Persediaan Dalam Proses ke persediaan definitif pada Modul Persediaan dengan kode barang yang sesuai, senilai penyerahan sebagian persediaan yang siap untuk digunakan tersebut. Jurnal otomatis akan terbentuk sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117xxx	Persediaan	Neraca
Cr	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca

Atas koreksi nilai persediaan dalam proses sebelumnya, untuk dapat menyesuaikan uang muka belanja atas pembayaran program FMS, satker merekam jurnal manual sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	11421x	Uang Muka Belanja xxx (prepayment)	Neraca
Cr	593311/ 391113	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Persediaan	LO/LPE

Dengan demikian, pada tanggal pelaporan keuangan, satker Kemhan/TNI akan memiliki saldo persediaan konsumsi yang sudah siap digunakan pada Neraca senilai penyerahan sebagian persediaan sebelumnya dan menyajikan saldo Uang Muka Belanja atas penyesuaian nilai persediaan dalam proses pada Neraca.

H. PENGAKUAN PENERIMAAN BARANG YANG BELUM DIBAYARKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Atas komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pertahanan antara Satker Kemhan/TNI dengan pemerintah Amerika Serikat, dapat dimungkinkan terjadi penambahan progres pekerjaan KDP dari pemerintah Amerika Serikat sebelum berakhirnya masa komitmen/perjanjian/ kontrak atau sampai dengan akhir tahun anggaran, namun belum dilakukan pembayaran oleh Satker Kemhan/TNI kepada penyedia.

Penambahan nilai progres KDP yang sampai akhir tahun anggaran belum dibayarkan oleh Satker Kemhan/TNI, perlu diungkapkan sebagai penambah nilai aset yang disajikan pada Neraca. Penambahan nilai aset KDP dicatat sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen BAST/BAPP atau dokumen lain yang dipersamakan.

1. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Modal

Jika satker Kemhan/TNI dalam rangka pelaksanaan program FMS terdapat penambahan progres KDP yang diterima namun belum dilakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran, Satker Kemhan/TNI perlu mencatat perolehan aset tersebut melalui koreksi nilai bertambah KDP.

Satker melakukan perekaman Koreksi Perubahan Nilai Bertambah pada Modul Aset Tetap, sehingga membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Neraca
Cr	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE

Atas perolehan barang yang belum dibayarkan tersebut, satker Kemhan/TNI perlu mengakui adanya utang pihak ketiga. Untuk mengakui adanya utang kepada pihak ketiga lainnya, Satker Kemhan/TNI merekam jurnal manual melalui Modul Aklap sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
Cr	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Neraca

Utang pihak ketiga lainnya ini akan dieliminasi saat terjadi pembayaran atas perolehan aset tersebut.

Saldo KDP yang disajikan pada laporan keuangan tahunan merepresentasikan nilai progres penyelesaian pengadaan barang program FMS yang telah diserahterimakan kepada satker melalui dokumen BAST/BAPP atau dokumen lain yang dipersamakan serta menyajikan saldo utang jangka pendek atas sisa pembayaran yang belum dibayarkan pada tahun anggaran berjalan pada Neraca satker Kemhan/TNI.

2. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Barang Menghasilkan Barang Persediaan

Apabila satker Kemhan/TNI terdapat penambahan progres penyelesaian persediaan dalam proses dalam rangka pelaksanaan program FMS, namun pembayaran belum dilakukan hingga akhir tahun anggaran, maka satker Kemhan/TNI perlu mencatat penambahan nilai persediaan dalam proses menggunakan koreksi nilai bertambah Persediaan Dalam Proses.

Satker melakukan perekaman Koreksi Perubahan Nilai Bertambah pada Modul Persediaan, sehingga membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca
Cr	491511/ 391113	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Persediaan	LO/LPE

Atas perolehan barang persediaan yang belum dibayarkan tersebut, satker Kemhan/TNI perlu mengakui adanya utang pihak ketiga. Untuk mengakui adanya utang kepada pihak ketiga lainnya, Satker Kemhan/TNI merekam jurnal manual melalui Modul Aklap sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	491511/ 391113	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Persediaan	LO/LPE
Cr	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Neraca

Utang pihak ketiga ini akan dieliminasi saat terjadi pembayaran atas perolehan aset tersebut.

Saldo Persediaan Dalam Proses yang disajikan pada laporan keuangan tahunan merepresentasikan nilai progres penyelesaian pengadaan barang persediaan yang telah diserahterimakan kepada satker melalui dokumen BAST/BAPP atau dokumen lain yang dipersamakan serta menyajikan saldo utang jangka pendek atas sisa pembayaran yang belum dibayarkan pada tahun anggaran berjalan pada Neraca satker Kemhan/TNI.

I. PENYELESAIAN KDP DAN PERSEDIAAN DALAM PROSES

Pada saat berakhirnya masa komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pertahanan dan telah dilakukan serah terima aset barang pertahanan secara keseluruhan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Modal

Dalam hal pembayaran program FMS/FMF menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin (532xxx) dan telah dicatat sebagai KDP, dan saat dilakukan serah terima aset tersebut telah **siap digunakan** dalam operasi Satker Kemhan/TNI, maka atas saldo aset KDP yang masih tercatat dilakukan penyelesaian menjadi aset tetap/aset lainnya secara definitif sebesar nilai nominal sesuai dengan BAST atau dokumen lain yang dipersamakan. Transaksi Penyelesaian Aset Definitif dilakukan pada Modul Aset Tetap sehingga membentuk jurnal otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	13xxxx	Aset Tetap/Lainnya	Neraca
Cr	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Neraca

2. Pembayaran Menggunakan Kode Akun Belanja Barang Menghasilkan Barang Persediaan

Dalam hal pembayaran program FMS/FMF menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan (52xxxx) dan telah dicatat sebagai Persediaan Dalam Proses, dan saat dilakukan serah terima aset tersebut telah **siap digunakan** dalam operasi Satker Kemhan/TNI, maka atas saldo aset persediaan dalam proses yang masih tercatat dilakukan penyelesaian menjadi barang persediaan secara definitif sebesar nilai nominal sesuai dengan BAST atau dokumen lain yang dipersamakan. Transaksi Penyelesaian Persediaan Dalam Proses dilakukan pada Modul Persediaan sehingga membentuk jurnal otomatis sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117xxx	Persediaan	Neraca
Cr	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca

J. SISA DANA PEMBAYARAN FMS/FMF DI REKENING PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas sisa dana dari pembayaran program FMS/FMF sesuai dengan komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pertahanan yang masih terdapat di rekening pemerintah Amerika Serikat dan belum direalisasikan hingga akhir periode pelaporan tahunan, diatur sebagai berikut:

1. Aset yang Telah Dicatat sebagai KDP

Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin (532xxx) dan telah dicatat sebagai KDP, apabila pada tanggal pelaporan tahunan diketahui persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai nominal pembayaran program FMS karena masih terdapat sisa dana yang belum direalisasikan pada rekening pemerintah Amerika Serikat, maka dilakukan penyesuaian pencatatan atas nilai aset KDP di Neraca dan Laporan BMN. Selisih kurang tersebut dicatat sebagai uang muka belanja di Neraca dan sebagai koreksi nilai atas aset KDP.

Satker Kemhan/TNI melakukan perekaman Koreksi Perubahan Nilai Berkurang – KDP pada Modul Aset Tetap atas aset KDP yang akan dikoreksi, sehingga akan membentuk jurnal otomatis sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
Cr	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Neraca

Selanjutnya, satker Kemhan/TNI merekam jurnal manual untuk menyesuaikan transaksi koreksi tersebut ke Uang Muka Belanja sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	11421x	Uang Muka Belanja xxx (prepayment)	Neraca
Cr	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE

2. Barang Telah Dicatat sebagai Persediaan Dalam Proses

Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan dan telah dicatat sebagai Persediaan Dalam

Proses, apabila pada tanggal pelaporan tahunan diketahui nilai barang persediaan yang telah diterima lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai nominal pembayaran program FMS karena masih terdapat sisa dana yang belum direalisasikan pada rekening pemerintah Amerika Serikat, maka dilakukan penyesuaian pencatatan atas nilai aset Persediaan Dalam Proses di Neraca. Selisih kurang tersebut dicatat sebagai uang muka belanja di Neraca dan sebagai koreksi nilai atas aset Persediaan Dalam Proses.

Satker Kemhan/TNI merekam Koreksi Nilai Persediaan pada Modul Persediaan sehingga akan terbentuk jurnal otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	593311/ 391113	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Persediaan	LO/LPE
Cr	117152	Persediaan Dalam Proses	Neraca

Selanjutnya, untuk menyesuaikan transaksi koreksi tersebut terhadap Uang Muka Belanja Barang, Satker Kemhan/TNI melakukan perekaman jurnal manual Modul Aklap sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	11421x	Uang Muka Belanja xxx (prepayment)	Neraca
Cr	593311/ 391113	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Persediaan	LO/LPE

3. Penyetoran Sisa Dana ke Kas Negara

Dalam hal sisa dana yang belum direalisasikan di rekening pemerintah Amerika Serikat atas pembayaran program FMS yang telah dilakukan oleh Satker Kemhan/TNI kemudian disetorkan kembali ke rekening kas negara, maka satker Kemhan/TNI perlu mencatat adanya realisasi pengembalian belanja modal/barang dan pengurangan atas aset KDP dan/atau uang muka belanja yang telah dicatat sebelumnya.

a. Penyetoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berjalan (TAB)

Satker merekam setoran penerimaan pengembalian belanja berdasarkan BPN pada Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE
Cr	53xxxx	Belanja Modal xxx	-

Buku Besar Kas			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Cr	53xxxx	Belanja Modal xxx	LRA

Selanjutnya, dalam hal satker menggunakan akun belanja modal dan telah dicatat sebagai KDP, satker merekam pengurangan nilai aset KDP atas pengembalian belanja tersebut menggunakan mekanisme Koreksi Perubahan Nilai Berkurang – KDP pada Modul Aset Tetap. Sehingga akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
Cr	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Neraca

Kemudian dilanjutkan dengan merekam jurnal manual pada Modul Aklap untuk menyesuaikan nilai belanja modal dan koreksi aset sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	53xxxx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
Cr	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE

Dalam hal satker menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan dan telah dicatat sebagai uang muka belanja oleh Satker Kemhan/TNI, atas pengembalian belanja tersebut direkam melalui Modul Bendahara berdasarkan BPN, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE
Cr	52xxxx	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan	-
Buku Besar Kas			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Cr	52xxxx	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan	LRA

Selanjutnya, satker merekam pengurangan nilai Persediaan Dalam Proses menggunakan mekanisme Koreksi Nilai Persediaan pada Modul Persediaan, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	593311/ 391113	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Persediaan	LO/LPE
Cr	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca

Atas transaksi koreksi tersebut, diperlukan jurnal manual pada Modul Aklap untuk menyesuaikan pengembalian belanja dan pengurangan nilai persediaan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	52xxxx	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan	-
Cr	593311/ 391113	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Persediaan	LO/LPE

- b. Penyetoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya (atas belanja TAYL)

Satker merekam setoran penerimaan pengembalian belanja berdasarkan BPN pada Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE
Cr	42591x	Penerimaan Kembali Belanja Barang/Modal Tahun Anggaran yang Lalu	LO
Buku Besar Kas			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Cr	42591x	Penerimaan Kembali Belanja Barang/Modal Tahun Anggaran yang Lalu	LRA

Selanjutnya, dalam hal satker menggunakan akun belanja modal dan telah dicatat sebagai KDP atau belanja barang yang telah disesuaikan menjadi penyesuaian saldo uang muka belanja pada akhir tahun, satker merekam jurnal manual pada Modul Akuntansi dan Pelaporan untuk mengeliminasi pengakuan pendapatan terhadap uang muka belanja sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	42591x	Penerimaan Kembali Belanja Barang/Modal Tahun Anggaran yang Lalu	LO
Cr	11421x	Uang Muka Belanja xxx (prepayment)	Neraca

4. Pengalihan Sisa Dana

Dalam hal masa komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pertahanan dengan pemerintah Amerika Serikat telah selesai, namun masih terdapat sisa dana yang belum direalisasikan pada rekening pemerintah Amerika Serikat atas pembayaran program FMS yang telah dilakukan oleh Satker Kemhan/TNI yang kemudian dana tersebut dialihkan ke komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pertahanan yang lain, maka atas sisa dana yang dialihkan tersebut dicatat sebagai uang muka belanja sebagai koreksi nilai atas aset KDP dan/atau persediaan dalam proses yang telah dicatat sebelumnya.

K. ASET DISERAHKAN DALAM KONDISI BELUM SIAP DIGUNAKAN

Atas komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pertahanan antara satker Kemhan/TNI dengan pemerintah Amerika Serikat, dapat dimungkinkan terjadi penyerahan aset barang pertahanan definitif oleh pemerintah Amerika Serikat telah dilakukan namun aset tersebut belum diterima secara fisik karena masih dalam tahap pengiriman (*shipping*), dan/atau aset tersebut telah diterima namun belum dalam kondisi siap pakai dikarenakan masih ada beberapa tahapan yang belum dilakukan seperti uji kelayakan, uji spesifikasi, uji fungsi, dan tahapan lainnya.

Ketentuan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan atas penyerahan aset barang pertahanan sebelum aset tersebut menjadi kondisi siap pakai diatur sebagai berikut:

1. **Dalam hal pembayaran menggunakan akun belanja modal (53xxxx),** atas aset barang pertahanan tersebut tetap dicatat sebagai KDP dan/atau uang muka belanja sebagaimana telah dicatat sebelumnya saat pembayaran/penyesuaian terakhir dilakukan. Aset KDP tersebut dapat direklasifikasi menjadi aset definitif setelah seluruh pekerjaan dan pembayaran telah dilakukan dan aset tersebut telah diperoleh secara fisik dan siap digunakan. Suatu aset dapat dinyatakan selesai dan siap digunakan berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai perjanjian dalam LOA atau dokumen lain yang dipersamakan dari pihak penyedia barang/jasa secara sah. Aset KDP dan/atau uang muka belanja tersebut tetap disajikan di Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
2. **Dalam hal pembayaran menggunakan akun belanja barang menghasilkan persediaan (52xxxx),** atas aset persediaan tersebut tetap dicatat sebagai Persediaan Dalam Proses sebagaimana telah dicatat sebelumnya saat pembayaran/penyesuaian terakhir dilakukan. Persediaan dapat diakui sebagai Persediaan definitif ketika pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, serta

telah diterima atau berpindah hak kepemilikannya dengan didukung dokumen sumber yang memadai seperti BAST, faktur, atau dokumen lain yang dipersamakan yang sah.

3. **Apabila hingga tanggal pelaporan/penyusunan laporan keuangan aset barang pertahanan tersebut belum diterima karena masih dalam pengiriman dan/atau belum dalam kondisi siap pakai**, maka pada tanggal pelaporan/penyusunan laporan keuangan satker Kemhan/TNI mencatat dan menyajikan aset tersebut sebagai KDP atau persediaan dalam proses dan/atau uang muka belanja sebesar nilai nominal aset barang pertahanan yang belum diterima barangnya dan/atau belum dalam kondisi siap pakai dengan menggunakan tata cara penyesuaian nilai aset terhadap uang muka sebagaimana dijelaskan pada poin D.2.

L. PEROLEHAN LAINNYA

Foreign Military Finance (FMF) merupakan program kerjasama dalam bentuk bantuan barang/jasa yang timbul dari adanya pengadaan barang/jasa pertahanan antara pemerintah Amerika Serikat dengan negara lain termasuk Indonesia. Proses pemberian bantuan bentuk barang/jasa program FMF ini dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia dalam bentuk *Letter of Offer and Acceptance* (LOA) yang memuat rincian barang/jasa pertahanan yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia melalui program FMF.

Selanjutnya, atas barang/jasa pertahanan yang diterima oleh pemerintah Indonesia melalui program FMF dilakukan pencatatan oleh Satker Kemhan/TNI dengan mekanisme perolehan lainnya, yang meliputi pengakuan aset barang pertahanan (berupa barang persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya), pengakuan beban jasa, dan pengakuan pendapatan perolehan lainnya dalam laporan keuangan Satker Kemhan/TNI. Dalam hal harga/nilai perolehan aset barang pertahanan tidak dapat diukur secara andal, maka aset barang pertahanan tersebut dicatat berdasarkan nilai wajar.

1. Perlakuan Akuntansi atas Perolehan Lainnya Bentuk Aset Barang Pertahanan dari Program FMF

Ketentuan pencatatan akuntansi atas perolehan lainnya bentuk barang/jasa berupa aset barang pertahanan oleh Satker Kemhan/TNI diatur sebagai berikut:

- a. Satker merekam Perolehan Lainnya Aset Tetap melalui Modul Aset Tetap – Perolehan Lainnya. Menu ini digunakan untuk merekam perolehan barang pertahanan berupa aset tetap dengan nilai minimum kapitalisasi Rp1.000.000 untuk Peralatan dan Mesin dan Rp25.000.000 untuk Gedung dan Bangunan. Satker agar mengetahui nilai aset perolehan lainnya dan mengidentifikasi

kode barang yang sesuai berdasarkan BAST atau dokumen sumber lainnya yang sah. Atas transaksi perekaman perolehan lainnya aset tetap, akan terbentuk jurnal

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	13xxxx	Aset Tetap/Lainnya	Neraca
Cr	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO

Atas transaksi ini, akan menyajikan pendapatan perolehan aset lainnya pada Laporan Operasional dan Aset Tetap di Neraca.

- b. Satker merekam Perolehan Lainnya Persediaan melalui Modul Persediaan – Perolehan Lainnya. Menu ini digunakan untuk merekam perolehan barang pertahanan berupa persediaan tanpa nilai minimum kapitalisasi. Satker agar mengetahui nilai dan kuantitas persediaan dan mengidentifikasi kode barang yang sesuai berdasarkan BAST atau dokumen sumber lainnya yang sah. Atas transaksi perekaman perolehan lainnya barang persediaan, akan terbentuk jurnal

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117xxx	Persediaan	Neraca
Cr	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO

Atas transaksi ini, akan menyajikan pendapatan perolehan aset lainnya pada Laporan Operasional dan Persediaan di Neraca.

- c. Atas Transaksi Perolehan Lainnya Aset tetap dan persediaan di atas, satker agar mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Dalam hal terdapat sisa dana yang telah dialokasikan pemerintah Amerika Serikat untuk program FMF yang terdapat di *Holding Account* (rekening DFAS) yang dikarenakan rekening DFAS bukan merupakan milik satker Kemhan/TNI, atas sisa saldo dana tersebut tidak disajikan di Neraca Satker Kemhan/TNI, namun agar diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Perlakuan Akuntansi atas Perolehan Lainnya Bentuk Jasa dari Program FMF

Ketentuan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan atas perolehan lainnya bentuk barang/jasa berupa jasa di bidang pertahanan oleh Satker Kemhan/TNI diatur sebagai berikut:

- a. Pada saat satker Kemhan/TNI menerima penyelenggaraan jasa di bidang pertahanan dari pemerintah Amerika Serikat yang disertai dengan Berita Acara Penyerahan/Penyelesaian Pekerjaan/Kegiatan atau dokumen lain

yang dipersamakan, perlu dilakukan perekaman atas beban jasa pertahanan dan pendapatan perolehan lainnya di Aplikasi SAKTI melalui Modul Akuntansi dan Pelaporan. Jurnal yang direkam pada menu Jurnal Manual adalah sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	596612	Beban Lainnya atas Pendapatan Perolehan Jasa	LO
Cr	491422	Pendapatan Perolehan Jasa	LO

Transaksi ini akan menyajikan pendapatan dan beban pada Laporan Operasional dengan Surplus/Defisit bernilai Nihil.

- b. Selanjutnya, atas perekaman perolehan lainnya berupa jasa di bidang pertahanan tersebut, agar diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- c. Dalam hal terdapat sisa dana yang telah dialokasikan pemerintah Amerika Serikat untuk program FMF yang terdapat di *Holding Account* (rekening DFAS) yang dikarenakan rekening DFAS bukan merupakan milik satker Kemhan/TNI, atas sisa saldo dana tersebut tidak disajikan di Neraca Satker Kemhan/TNI, namun agar diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Perolehan Lainnya pada Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Dalam hal terdapat barang/jasa yang diterima oleh satker Kemhan/TNI yang merupakan bagian dari transaksi perolehan lainnya program FMF pada tahun-tahun anggaran yang lalu, maka atas barang/jasa pertahanan tersebut perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu, apakah terdapat sisa barang/jasa pertahanan yang masih memiliki masa manfaat dan dapat digunakan dalam operasional satker Kemhan/TNI pada masa yang akan datang atau tidak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan bahwa atas jasa di bidang pertahanan dari program FMF TAYL sudah selesai diselenggarakan, sudah tidak terdapat sisa aset barang pertahanan, atau terdapat sisa aset barang pertahanan namun sudah tidak memiliki masa manfaat serta tidak dapat lagi digunakan dalam operasional satker Kemhan/TNI pada masa yang akan datang, maka atas barang/jasa pertahanan tersebut tidak dilakukan pencatatan dan penyajian di laporan keuangan Satker Kemhan/TNI. Barang/jasa tersebut cukup diungkapkan dalam CaLK secara memadai.
- b. Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan bahwa masih terdapat aset barang pertahanan yang masih memiliki masa manfaat dan dapat digunakan dalam operasional satker Kemhan/TNI pada masa yang akan datang, maka atas barang/jasa tersebut dilakukan pencatatan oleh satker Kemhan/TNI dengan

menggunakan mekanisme perolehan Saldo Awal pada Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan. Perekaman perolehan Saldo Awal tersebut akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Saldo Awal Persediaan

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	117xxx	Persediaan	Neraca
Cr	391113	Koreksi Nilai Persediaan	LPE

Saldo Awal Aset Tetap dengan pengakuan Akumulasi Penyusutan

Buku Besar AkruaI			
Db/Cr	Kode Akun	Uraian Akun	Pos
Db	13xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	Neraca
Db	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya non Revaluasi	LPE
Cr	137xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Lainnya	Neraca
Cr	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya non Revaluasi	LPE

___oOo___